

# Pengaruh SIPD RI terhadap Kinerja Bendahara Melalui Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Yang Dimoderasi Kompetensi Digital di Kabupaten Magetan

<sup>1</sup> Ivan Haryo Ramadani

<sup>2</sup>Umu Khourah

<sup>3</sup>Pudjo Sugito

Program Studi Magister Manajemen, Universitas Merdeka Malang, Indonesia

Email: [superevefun@gmail.com](mailto:superevefun@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines the effect of the implementation of Indonesia's Regional Government Information System (SIPD RI) on the performance of expenditure treasurers, with internal control and accountability as mediating variables and digital competency as a moderating variable, in the Magetan Regency Government. A quantitative explanatory approach was used, with the population comprising all 126 expenditure treasurers and assistant treasurers across regional work units (OPD) in Magetan Regency, all of whom served as respondents (census). Data were collected through a Likert-scale questionnaire and analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4.1.1.8. Results show that SIPD RI implementation positively and significantly affects internal control and accountability, but has no significant direct effect on performance. Accountability fully mediates the effect of SIPD RI on performance, while internal control is not supported as a mediator, and digital competency does not moderate any path in the model. These findings indicate that the benefits of regional financial information systems for individual performance are indirect and depend on strengthening accountability as the transmission mechanism.*

**Keywords:** *accountability, digital competency, expenditure treasurer performance, internal control, SIPD RI*

## PENDAHULUAN

Digitalisasi tata kelola pemerintahan telah menjadi strategi utama dalam meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah (Agostino et al., 2022; Alsharari & Ikem, 2023). Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang kemudian dikembangkan menjadi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai platform terintegrasi nasional untuk mengelola seluruh siklus keuangan daerah, dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Kewajiban penggunaannya dipertegas melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 823 Tahun 2023 yang menetapkan SIPD RI sebagai aplikasi umum bidang pemerintah daerah yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah.

Keberhasilan implementasi sistem informasi keuangan daerah ditentukan oleh keandalan sistem, efektivitas pengendalian internal, dan standar akuntabilitas manajemen keuangan (Kiranayanti & Erawati, 2016; Winidyaningrum, 2009). Namun demikian, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa

Timur (2025) mengonfirmasi kelemahan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Magetan, antara lain kebijakan akuntansi yang belum sepenuhnya dimutakhirkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan serta permasalahan dalam penatausahaan belanja. Observasi awal di lapangan juga menemukan gangguan teknis berulang pada SIPD RI yang bersumber dari sistem pusat, yang berpotensi menghambat proses penatausahaan dan pelaporan keuangan oleh bendahara pengeluaran.

Bendahara pengeluaran merupakan salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam implementasi SIPD RI karena secara langsung berinteraksi dengan sistem dalam melaksanakan penatausahaan, pencatatan, pembayaran, dan pertanggungjawaban keuangan. Keberhasilan implementasi sistem pada tingkat organisasi karena itu tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas sistem, tetapi juga oleh kemampuan pengguna dalam memanfaatkan sistem tersebut. Sistem informasi yang memiliki fitur dan informasi yang memadai tetap membutuhkan pengguna yang mampu memahami fungsi sistem, mengoperasikan fitur, mengelola informasi digital, mengidentifikasi permasalahan, serta menggunakan teknologi secara tepat. Dengan demikian, kompetensi pengguna menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa investasi teknologi informasi dapat menghasilkan manfaat nyata bagi proses kerja dan kinerja individu.

Kompetensi digital menjadi semakin penting dalam konteks bendahara pengeluaran karena penggunaan SIPD RI menuntut kemampuan yang lebih luas daripada sekadar kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi. Kompetensi digital mencakup kemampuan mengelola informasi dan data, berkomunikasi dan berkolaborasi secara digital, menciptakan dan mengelola konten digital, menjaga keamanan dalam penggunaan teknologi, serta memecahkan permasalahan yang muncul dalam lingkungan digital. (Carretero et al., 2017) menjelaskan bahwa kompetensi digital merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan individu untuk menggunakan teknologi digital secara percaya diri, kritis, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kompetensi tersebut menjadi relevan karena bendahara tidak hanya dituntut mampu memasukkan data ke dalam sistem, tetapi juga memahami informasi yang dihasilkan, memastikan ketepatan proses, serta merespons permasalahan yang muncul selama penggunaan SIPD RI.

Dalam penelitian ini, kompetensi digital ditempatkan sebagai variabel moderasi, bukan sebagai variabel independen yang secara langsung menjelaskan kinerja. Penempatan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tingkat kompetensi digital pengguna secara teoritis dapat menentukan kuat atau lemahnya manfaat implementasi SIPD RI. Sistem yang sama dapat memberikan manfaat yang berbeda ketika digunakan oleh pengguna dengan tingkat kompetensi digital yang berbeda. Bendahara yang memiliki kompetensi digital lebih baik secara teoritis lebih mampu memahami informasi, memanfaatkan fitur sistem, mengidentifikasi kesalahan, dan menyelesaikan permasalahan penggunaan teknologi sehingga

manfaat implementasi SIPD RI terhadap pengendalian internal, akuntabilitas, maupun kinerja dapat menjadi lebih kuat. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi digital dapat menyebabkan berbagai fungsi sistem belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, kompetensi digital dipandang sebagai kondisi yang berpotensi mengubah kekuatan hubungan antara implementasi SIPD RI dengan keluaran yang dihasilkan, sehingga lebih tepat diuji sebagai variabel moderasi.

Selain kompetensi digital, keberhasilan digitalisasi pengelolaan keuangan juga perlu dilihat melalui mekanisme pengendalian internal dan akuntabilitas. Penggunaan sistem informasi tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Pengendalian internal tetap diperlukan untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan, efektivitas operasi, serta kepatuhan terhadap peraturan. Dalam kerangka (COSO, 2013), pengendalian internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh dewan, manajemen, dan personel organisasi yang dirancang untuk memberikan reasonable assurance atas pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks SIPD RI, integrasi proses, standardisasi prosedur, dokumentasi transaksi, pengaturan akses, dan keterlacakan aktivitas dapat memperkuat pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pentingnya pengendalian internal juga didukung oleh penelitian terdahulu. (Dewi et al., 2023) menunjukkan bahwa implementasi SIPD berkaitan dengan penguatan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah, sedangkan (Hayat & Yulianty, 2023) menunjukkan bahwa sistem informasi pemerintahan daerah dapat mendukung pengendalian dan pencegahan penyimpangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi dapat menjadi instrumen yang membantu organisasi membangun proses pengendalian yang lebih terstruktur. Namun demikian, pengendalian internal pada dasarnya lebih berorientasi pada pengamanan proses, kepatuhan, pencegahan kesalahan, dan pemberian keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan. Oleh karena itu, penguatan pengendalian internal belum tentu secara otomatis menghasilkan peningkatan kinerja individual bendahara.

Selain pengendalian internal, akuntabilitas memiliki peran krusial dalam pengelolaan keuangan publik. Pengelolaan sumber daya pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. (Mardiasmo, 2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pihak yang diberi amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam konteks SIPD RI, informasi dan pencatatan transaksi yang lebih terstruktur dapat meningkatkan keterlacakan proses pengelolaan keuangan sehingga mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban bendahara. Penelitian (Septiani & Isnawaty, 2024; Situmorang, 2023; Tumija & Erlambang, 2023) menunjukkan bahwa implementasi SIPD dapat mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja bendahara pengeluaran menjadi penting karena bendahara memiliki tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kinerja bendahara tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Implementasi SIPD RI secara teoritis dapat mendukung kinerja melalui penyediaan informasi dan dukungan terhadap proses kerja. Namun, manfaat tersebut tidak selalu bersifat langsung. Keberhasilan sistem dalam meningkatkan kinerja dapat bergantung pada bagaimana sistem tersebut diterjemahkan ke dalam proses pengendalian dan pertanggungjawaban dalam organisasi.

Secara spesifik, belum ditemukan kajian mengenai pengaruh implementasi SIPD RI terhadap kinerja bendahara pengeluaran dengan pengendalian internal dan akuntabilitas sebagai mediator serta kompetensi digital sebagai moderator dalam konteks pemerintah kabupaten di Indonesia. Kesenjangan penelitian inilah yang mendasari urgensi kajian ini, dengan Pemerintah Kabupaten Magetan dipilih sebagai lokus penelitian mengingat temuan BPK dan kendala implementasi yang telah teridentifikasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pengaruh implementasi SIPD RI terhadap kinerja bendahara pengeluaran, baik secara langsung maupun melalui mediasi pengendalian internal dan akuntabilitas, serta apakah kompetensi digital memoderasi hubungan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh langsung implementasi SIPD RI terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pengaruh implementasi SIPD RI terhadap pengendalian internal dan akuntabilitas, pengaruh pengendalian internal dan akuntabilitas terhadap kinerja, peran mediasi kedua variabel tersebut, serta peran moderasi kompetensi digital. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai adopsi sistem informasi pemerintahan daerah melalui integrasi *Technology Acceptance Model*, *Information System Success Model*, dan *Human Capital Theory*. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Magetan dan pemerintah daerah lain dalam mengoptimalkan implementasi SIPD RI.

## LANDASAN TEORI

Penelitian ini didasarkan pada tiga *grand theory*. *Technology Acceptance Model* (Davis et al., 1989) menjelaskan penerimaan bendahara pengeluaran terhadap SIPD RI melalui persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sistem. *Information System Success Model* (DeLone & McLean, 1992) menegaskan bahwa kualitas sistem dan informasi memengaruhi kepuasan pengguna serta manfaat bersih suatu sistem informasi, termasuk kontribusinya terhadap pengendalian internal dan akuntabilitas. *Human Capital Theory* (Becker, 1964) memosisikan kompetensi digital aparatur sebagai bentuk investasi modal manusia yang menentukan efektivitas pemanfaatan sistem digital dalam mendukung kinerja organisasi.

Kelima variabel penelitian ini didefinisikan secara konseptual sebagai berikut. Implementasi SIPD RI ialah tingkat penerapan SIPD RI dalam mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, sampai pelaporan keuangan, diukur melalui lima dimensi ISSM: kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan sistem, dan kepuasan pengguna. Pengendalian internal ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan seluruh pegawai, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, meliputi efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku (COSO, 2013), dengan lima komponen: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan pelaksanaan kegiatan serta hasil yang dicapai kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2021), dengan empat dimensi mengacu (Mahmudi, 2019): akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Kompetensi digital ialah kemampuan untuk mempergunakan teknologi digital secara percaya diri, kritis, dan bertanggung jawab untuk pembelajaran, pekerjaan, dan partisipasi dalam masyarakat (Carretero et al., 2017), tersusun atas literasi data dan informasi, komunikasi digital, keamanan digital, dan pemecahan masalah digital. Kinerja bendahara pengeluaran merupakan hasil kerja yang dicapai oleh individu dalam organisasi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang dimiliki (Moeheriono & Si, 2012), diukur melalui kualitas, kuantitas, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab mengacu (Mangkunegara, 2017).

### **Pengaruh Implementasi SIPD RI terhadap Kinerja Bendahara Pengeluaran**

*Information System Success Model* (DeLone & McLean, 1992) menjelaskan bahwa keberhasilan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih yang dihasilkan. Dalam konteks SIPD RI, sistem yang mampu menyediakan informasi yang berkualitas dan mendukung proses kerja diharapkan dapat membantu bendahara melaksanakan tugas secara lebih efektif dan efisien. Penelitian (Dewi et al., 2023) menunjukkan adanya pengaruh implementasi SIPD terhadap kinerja pengelola keuangan. Berdasarkan argumen tersebut, dirumuskan:

H1: Implementasi SIPD RI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Bendahara Pengeluaran.

### **Pengaruh Implementasi SIPD RI terhadap Pengendalian Internal**

SIPD RI yang menyediakan fitur pencatatan, verifikasi, rekonsiliasi, dan pelaporan terstandarisasi secara langsung memperkuat komponen pemantauan (*monitoring*) dan aktivitas pengendalian (*control activities*) dalam kerangka (COSO,

2013). (Hayat & Yulianty, 2023) menemukan bahwa implementasi SIPD meningkatkan pengendalian internal sehingga mengurangi ruang terjadinya *fraud* di perangkat daerah, (Dewi et al., 2023) membuktikan implementasi SIPD meningkatkan standarisasi prosedur kerja pengelola keuangan, dan (Mamić Sačer & Oluić, 2013) memperlihatkan bahwa semakin baik implementasi sistem informasi akuntansi, semakin efektif pula mekanisme pengendalian internal. Berdasarkan argumen tersebut, dirumuskan:

H2: Implementasi SIPD RI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengendalian Internal.

### **Pengaruh Implementasi SIPD RI terhadap Akuntabilitas**

(Situmorang, 2023) menegaskan penggunaan SIPD meningkatkan kualitas akuntabilitas melalui penguatan transparansi pencatatan, (Tumija & Erlambang, 2023) memperlihatkan integrasi modul perencanaan-penganggaran-pelaporan menyediakan data keuangan yang lebih terkonsolidasi dan dapat dipertanggungjawabkan, (Septiani & Isnawaty, 2024) mengonfirmasi SIPD meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan melalui keterbukaan proses, dan (Aditiya & Kusuma, 2024) membuktikan penerapan SIPD meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Berdasarkan argumen tersebut, dirumuskan:

H3: Implementasi SIPD RI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas.

### **Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Bendahara Pengeluaran**

Pengendalian internal merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi dilaksanakan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku. (COSO, 2013) menempatkan pengendalian internal sebagai proses yang memberikan reasonable assurance terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks bendahara pengeluaran, pengendalian internal dapat membantu memastikan bahwa transaksi dilaksanakan sesuai prosedur, memiliki bukti yang memadai, memperoleh otorisasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hubungan antara pengendalian internal dan kinerja memperoleh dukungan dari penelitian terdahulu. (Maelani & Susilawati, 2025) menunjukkan bahwa pengendalian internal menjadi bagian penting dalam lingkungan yang memengaruhi kinerja organisasi, meskipun efeknya perlu dilihat bersama faktor organisasi lainnya. Sementara itu, (Naida et al., 2023) menemukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan argumen tersebut, dirumuskan:

H4: Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Bendahara Pengeluaran.

## Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Bendahara Pengeluaran

Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyampaian laporan, tetapi juga dengan kewajiban individu untuk mempertanggungjawabkan proses dan hasil pelaksanaan tugas. Dalam pengelolaan keuangan daerah, bendahara yang memiliki tuntutan akuntabilitas tinggi akan terdorong untuk melaksanakan tugas secara lebih tertib, teliti, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, akuntabilitas secara teoritis memiliki hubungan dengan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

(Ratnajati & Zulfikar, 2023) menegaskan akuntabilitas berperan penting meningkatkan kinerja organisasi sektor public, (Mattoasi & Jainuddin, 2024) menemukan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah; (Melasari et al., 2022) mengonfirmasi kontribusi signifikan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah baik parsial maupun simultan; dan (Jatmiko et al., 2022) membuktikan akuntabilitas keuangan publik berpengaruh positif terhadap *value for money performance* pemerintahan daerah. Berdasarkan argumen tersebut, dirumuskan:

H5: Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Bendahara Pengeluaran.

## Pengendalian Internal memediasi pengaruh SIPD RI terhadap Kinerja Bendahara Pengeluaran

Implementasi SIPD RI secara teoritis dapat meningkatkan kinerja melalui pengendalian internal. Sistem yang terintegrasi dapat menciptakan proses yang lebih terstruktur, meningkatkan keterlacakan transaksi, dan membantu memastikan bahwa aktivitas dilakukan sesuai prosedur. Pengendalian yang semakin baik selanjutnya diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertib dan mengurangi kesalahan sehingga mendukung kinerja bendahara.

Penelitian (Nisa et al., 2026) menunjukkan bahwa SIPD dan sistem pengendalian internal memiliki keterkaitan dengan kualitas laporan keuangan dan pencegahan *fraud* pada pemerintah daerah. Sementara itu, (Puspita & Amalia, 2014) membuktikan mediasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah antara pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan berhasil signifikan. Temuan tersebut memberikan dasar bahwa implementasi sistem informasi dapat berkontribusi terhadap keluaran pengelolaan keuangan melalui lingkungan pengendalian yang lebih baik.

Dengan demikian, apabila SIPD RI mampu meningkatkan pengendalian internal dan pengendalian internal selanjutnya meningkatkan kinerja bendahara, maka pengendalian internal dapat berfungsi sebagai mekanisme transmisi pengaruh SIPD RI terhadap kinerja. Berdasarkan argumentasi tersebut:

H6: Pengendalian Internal memediasi pengaruh Implementasi SIPD RI terhadap Kinerja Bendahara Pengeluaran.

## Akuntabilitas memediasi pengaruh Implementasi SIPD RI terhadap Kinerja Bendahara Pengeluaran

Penelitian (Satrio et al., 2026) secara khusus menguji implementasi SIPD-RI terhadap kualitas laporan keuangan dengan akuntabilitas sebagai variabel intervening. Penelitian tersebut memperlihatkan relevansi akuntabilitas sebagai mekanisme yang menghubungkan implementasi SIPD-RI dengan keluaran pengelolaan keuangan. Selain itu, (Sofyani, 2024) memperlihatkan kompetensi aparatur berperan memediasi hubungan faktor organisasi dan kualitas sistem informasi akuntansi. Berdasarkan argumen tersebut, dirumuskan:

H7: Akuntabilitas memediasi pengaruh Implementasi SIPD RI terhadap Kinerja Bendahara Pengeluaran.

## Peran Moderasi Kompetensi Digital

*Human Capital Theory* memandang kompetensi digital sebagai modal manusia yang berpotensi memperkuat sejauh mana implementasi SIPD RI diterjemahkan menjadi pengendalian internal, akuntabilitas, dan kinerja yang lebih baik. (Agustiawan & Rasmini, 2016) menemukan efek moderasi kompetensi SDM dalam hubungan teknologi informasi dan akuntabilitas sangat bergantung pada konteks implementasi sistem, (Naida et al., 2023) memperlihatkan kompetensi SDM memperkuat pengaruh sistem informasi pemerintah daerah pada dimensi teknis kualitas laporan keuangan, dan (Rahmadani & Khairul, 2024) serta (Azwir et al., 2025) menemukan kompetensi digital berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur, meski dalam beberapa konteks bersifat langsung dan independen ketimbang sebagai moderator. Berdasarkan argumen tersebut, dirumuskan:

H8a: Kompetensi Digital memperkuat pengaruh Implementasi SIPD RI terhadap Pengendalian Internal.

H8b: Kompetensi Digital memperkuat pengaruh Implementasi SIPD RI terhadap Akuntabilitas.

H8c: Kompetensi Digital memperkuat pengaruh Implementasi SIPD RI terhadap Kinerja Bendahara Pengeluaran.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory research* untuk menguji hubungan kausal antarvariabel melalui pengujian hipotesis, dilaksanakan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Magetan. Populasi penelitian adalah seluruh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu yang berjumlah 126 orang, dan seluruhnya dijadikan responden (sensus). Data primer dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju) yang disebarakan secara daring melalui *Google Form*.

Indikator kelima variabel penelitian, yang diadaptasi dari masing-masing rujukan teoretis, disajikan pada Tabel 1.

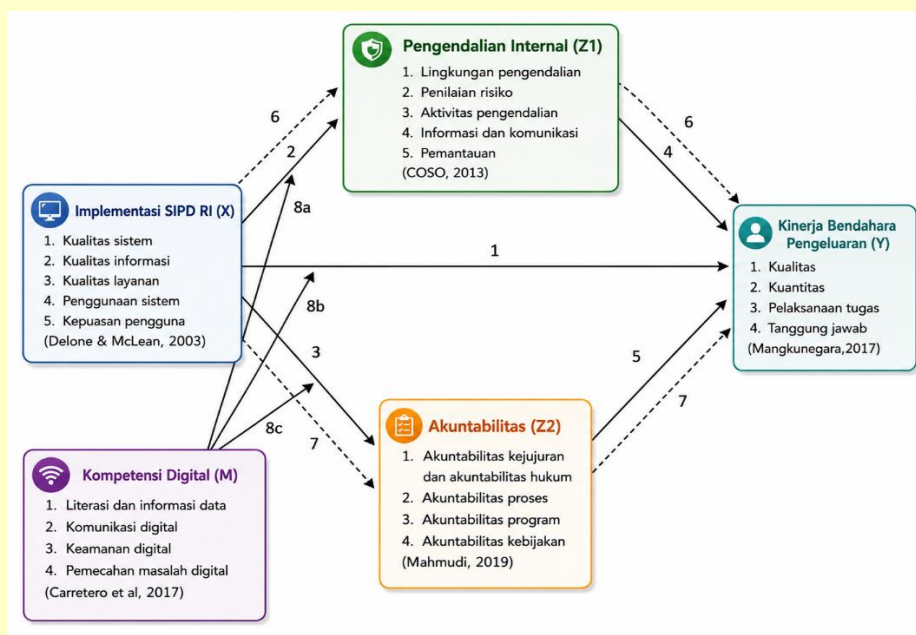
Tabel 1. Instrumen Penelitian

| Variabel                      | Indikator                         | Sumber                  | Jml Item |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| SIPD RI                       | Kualitas sistem                   | DeLone & McLean (1992)  | 2        |
|                               | Kualitas informasi                |                         | 2        |
|                               | Kualitas layanan                  |                         | 2        |
|                               | Penggunaan sistem                 |                         | 2        |
|                               | Kepuasan pengguna                 |                         | 2        |
| Pengendalian Internal         | Lingkungan pengendalian           | COSO (2013)             | 2        |
|                               | Penilaian risiko                  |                         | 2        |
|                               | Aktivitas pengendalian            |                         | 2        |
|                               | Informasi dan komunikasi          |                         | 2        |
|                               | Pemantauan                        |                         | 2        |
| Akuntabilitas                 | Akuntabilitas kejujuran dan hukum | Mahmudi (2019)          | 2        |
|                               | Akuntabilitas proses              |                         | 2        |
|                               | Akuntabilitas program             |                         | 2        |
|                               | Akuntabilitas kebijakan           |                         | 2        |
| Kompetensi Digital            | Literasi data dan informasi       | Carretero et al. (2017) | 2        |
|                               | Komunikasi digital                |                         | 2        |
|                               | Keamanan digital                  |                         | 2        |
|                               | Pemecahan masalah digital         |                         | 2        |
| Kinerja Bendahara Pengeluaran | Kualitas                          | Mangkunegara (2017)     | 2        |
|                               | Kuantitas                         |                         | 2        |
|                               | Pelaksanaan tugas                 |                         | 2        |
|                               | Tanggung jawab                    |                         | 2        |

Penelitian melibatkan lima variabel: implementasi SIPD RI sebagai variabel independen, diukur melalui lima indikator mengacu *Information System Success Model* (DeLone & McLean, 1992) - kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan sistem, dan kepuasan pengguna; pengendalian internal dan akuntabilitas sebagai variabel mediasi, masing-masing diukur mengacu kerangka (COSO, 2013) dan (Mahmudi, 2019); kompetensi digital sebagai variabel moderasi, diukur mengacu DigComp (Carretero et al., 2017); serta kinerja bendahara pengeluaran sebagai variabel dependen, diukur mengacu (Mangkunegara, 2017).

Kerangka konseptual pada penelitian ini adalah didasari oleh gambar berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Total 44 item pernyataan diujicobakan kepada 30 responden untuk uji validitas (korelasi *Pearson Product-Moment*,  $r$ -tabel 0,361) dan uji reliabilitas (*Cronbach's Alpha*, ambang batas 0,60 mengacu (Ghozali & Latan, 2015). Hasil uji validitas menunjukkan satu item pernyataan tidak valid, yaitu item kedua pada indikator Kualitas Sistem variabel SIPD RI ("Sistem SIPD RI beroperasi dengan stabil tanpa mengalami gangguan teknis yang menghambat pekerjaan"), dengan nilai  $r$ -hitung 0,084, berada di bawah  $r$ -tabel 0,361. Item tersebut dieliminasi dan tidak disertakan pada kuesioner untuk pengumpulan data utama, sehingga 43 item lainnya dipergunakan sebagai instrumen final penelitian ini.

Data utama dianalisis menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS versi 4.1.1.8, mencakup evaluasi *outer model*, evaluasi *inner model* (*R-Square*, *Variance Inflation Factor*, model fit SRMR dan NFI), serta pengujian hipotesis melalui prosedur *bootstrapping* dengan *two-tailed test* pada taraf signifikansi 5% (kriteria penerimaan:  $t$ -statistik  $\geq 1,96$  dan  $p$ -value  $< 0,05$ ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 126 responden, mayoritas berjenis kelamin perempuan (86 orang; 68,25%) dibandingkan laki-laki (40 orang; 31,75%). Berdasarkan usia, kelompok 41-50 tahun mendominasi (49 responden; 38,89%), diikuti kelompok di atas 50 tahun (30 responden; 23,81%), menunjukkan bahwa mayoritas bendahara pengeluaran berada pada rentang usia dengan pengalaman kerja yang relatif tinggi.

Tabel 2. Gambaran Responden

| No. | Karakteristik | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase (%) |
|-----|---------------|---------------|--------|----------------|
| 1   | Jenis Kelamin | Laki-laki     | 40     | 31,75%         |
|     |               | Perempuan     | 86     | 68,25%         |
|     |               | Subtotal      | 126    | 100%           |
| 2   | Umur          | ≤ 30 tahun    | 23     | 18,25%         |
|     |               | 31-40 tahun   | 24     | 19,05%         |
|     |               | 41-50 tahun   | 49     | 38,89%         |
|     |               | > 50 tahun    | 30     | 23,81%         |
|     |               | Subtotal      | 126    | 100%           |

Seluruh indikator dinyatakan valid berdasarkan nilai *outer loading* dan *Average Variance Extracted* (AVE) di atas 0,50, serta memenuhi kriteria validitas konvergen. Reliabilitas konstruk pada sampel utama (n=126) disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Reliabilitas Konstruk (Cronbach's Alpha dan Composite Reliability, n=126)

| Variabel                      | AVE   | Cronbach's Alpha | Composite Reliability | Keterangan         |
|-------------------------------|-------|------------------|-----------------------|--------------------|
| SIPD RI                       | 0,551 | 0,898            | 0,914                 | Valid dan Reliabel |
| Pengendalian Internal         | 0,772 | 0,967            | 0,968                 | Valid dan Reliabel |
| Akuntabilitas                 | 0,790 | 0,962            | 0,965                 | Valid dan Reliabel |
| Kompetensi Digital            | 0,721 | 0,945            | 0,947                 | Valid dan Reliabel |
| Kinerja Bendahara Pengeluaran | 0,781 | 0,960            | 0,961                 | Valid dan Reliabel |

Validitas diskriminan diuji melalui kriteria *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT), sebagaimana disajikan pada Tabel 3. Seluruh nilai HTMT berada dalam rentang 0,220-0,859, di bawah ambang batas 0,90 (Henseler et al., 2015), sehingga kriteria validitas diskriminan terpenuhi.

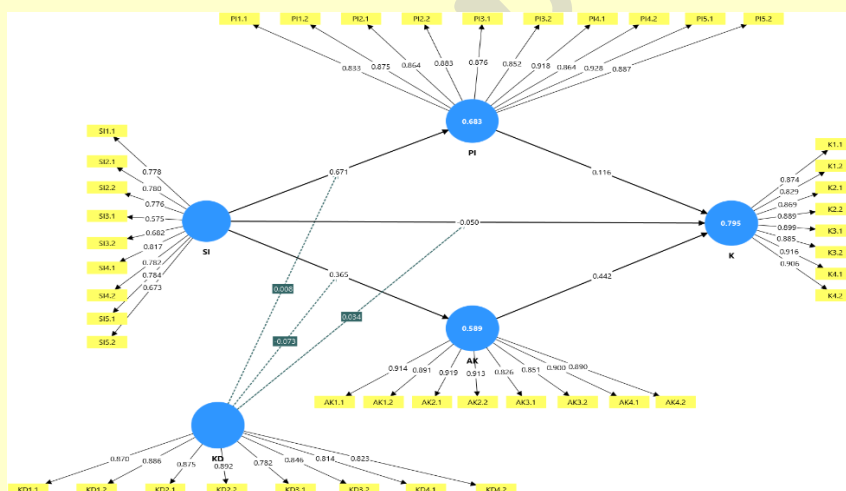
Tabel 4. Hasil Uji *Heterotrait-Monotrait Ratio*

| Konstruk      | Akuntabilitas | Kinerja Bendahara | Kompetensi Digital | Pengendalian Internal | SIPD RI |
|---------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| Akuntabilitas |               |                   |                    |                       |         |

| Konstruk                      | Akuntabilitas | Kinerja Bendahara | Kompetensi Digital | Pengendalian Internal | SIPD RI |
|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| Kinerja Bendahara Pengeluaran | 0,829         | -                 | -                  | -                     | -       |
| Kompetensi Digital            | 0,704         | 0,859             | -                  | -                     | -       |
| Pengendalian Internal         | 0,723         | 0,710             | 0,670              | -                     | -       |
| SIPD RI                       | 0,689         | 0,657             | 0,669              | 0,852                 | -       |
| KD × SI                       | 0,366         | 0,220             | 0,224              | 0,275                 | 0,341   |

Nilai *R-Square* menunjukkan implementasi SIPD RI menjelaskan 68,3% varians Pengendalian Internal, 58,9% varians Akuntabilitas (kategori moderat untuk keduanya), dan model keseluruhan menjelaskan 79,5% varians Kinerja Bendahara Pengeluaran (kategori substansial). Gambar 2 menyajikan output PLS-SEM *Algorithm* yang memperlihatkan nilai  $R^2$  penelitian.

Gambar 2. Output Model PLS SEM Algorithm



Seluruh nilai *Variance Inflation Factor* berada di bawah 5,00. Uji kesesuaian model menunjukkan nilai SRMR sebesar 0,080 (fit) dan NFI sebesar 0,722 (dapat diterima). Hasil *bootstrapping* efek langsung, mediasi, dan moderasi disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis (Bootstrapping, two-tailed, alpha=0,05)

| Hipotesis / Jalur      | Koefisien | t-stat | p-value | Ket.    |
|------------------------|-----------|--------|---------|---------|
| H1: SIPD RI -> Kinerja | -0,050    | 0,641  | 0,522   | Ditolak |

| Hipotesis / Jalur                                          | Koefisien | t-stat | p-value | Ket.     |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|----------|
| H2: SIPD RI -> Pengendalian Internal                       | 0,671     | 8,213  | 0,000   | Diterima |
| H3: SIPD RI -> Akuntabilitas                               | 0,365     | 4,983  | 0,000   | Diterima |
| H4: Pengendalian Internal -> Kinerja                       | 0,116     | 1,260  | 0,208   | Ditolak  |
| H5: Akuntabilitas -> Kinerja                               | 0,442     | 5,753  | 0,000   | Diterima |
| H6: SIPD RI -> Pengendalian Internal -> Kinerja            | 0,078     | 1,197  | 0,231   | Ditolak  |
| H7: SIPD RI -> Akuntabilitas -> Kinerja                    | 0,161     | 3,519  | 0,000   | Diterima |
| H8a: Kompetensi Digital x SIPD RI -> Pengendalian Internal | 0,008     | 0,229  | 0,819   | Ditolak  |
| H8b: Kompetensi Digital x SIPD RI -> Akuntabilitas         | -0,073    | 1,708  | 0,088   | Ditolak  |
| H8c: Kompetensi Digital x SIPD RI -> Kinerja               | 0,034     | 1,062  | 0,288   | Ditolak  |

SIPD RI tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kinerja bendahara pengeluaran. Dalam perspektif ISSM (DeLone & McLean, 1992), manfaat sistem terhadap kinerja tidak bersifat otomatis, tetapi bergantung pada kualitas sistem, informasi, dan kepuasan pengguna. Karena SIPD RI bersifat wajib, tingkat penggunaannya relatif seragam sehingga kinerja lebih dipengaruhi faktor lain seperti akuntabilitas, pengalaman, dan motivasi. Temuan ini sejalan dengan (Puspita & Amalia, 2014; Tumija & Erlambang, 2023) yang menunjukkan bahwa manfaat langsung sistem informasi dapat terhambat oleh faktor implementasi dan lebih efektif melalui variabel antara.

SIPD RI berpengaruh positif signifikan terhadap pengendalian internal. Temuan ini mendukung ISSM dan (COSO, 2013), karena fitur pencatatan, verifikasi, rekonsiliasi, dan pelaporan yang terstandarisasi memperkuat aktivitas pengendalian dan pemantauan. Hasil ini sejalan dengan (Hayat & Yulianty, 2023), (Dewi et al., 2023), serta (Mamić Sačer & Oluić, 2013).

SIPD RI berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas. ISSM menjelaskan bahwa sistem yang berkualitas menghasilkan informasi akurat, relevan, dan tepat waktu. Temuan ini sejalan dengan (Situmorang, 2023), (Tumija & Erlambang, 2023), (Septiani & Isnawaty, 2024), serta (Aditiya & Kusuma, 2024).

Pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja, meskipun koefisiennya positif, dengan effect size sangat kecil ( $f^2=0,019$ ). Dalam perspektif HCT, efektivitas pengendalian bergantung pada kapasitas SDM dalam menerapkannya. Pengendalian internal pada sektor publik juga lebih berorientasi pada kepatuhan dan akuntabilitas daripada peningkatan produktivitas individu. Temuan ini sejalan dengan (Wibowo et al., 2023), sehingga penguatan pengendalian internal perlu diintegrasikan dengan akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja.

Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, mengonfirmasi akuntabilitas sebagai determinan penting peningkatan kinerja bendahara pengeluaran. Dalam perspektif HCT, aparatur dengan nilai akuntabilitas kuat mencerminkan kualitas modal manusia yang tinggi hasil investasi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional - yang memicu individu bekerja disiplin dan berorientasi hasil. (Ratnajati & Zulfikar, 2023), (Mattoasi & Jainuddin, 2024), (Melasari et al., 2022), dan (Jatmiko et al., 2022) secara konsisten mengonfirmasi peran akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja organisasi maupun individu sektor publik.

Pengendalian internal tidak terbukti memediasi pengaruh SIPD RI terhadap kinerja, sejalan dengan tidak signifikannya pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja (H4). SIPD RI memang mampu memperkuat pengendalian internal, tetapi peningkatan pengendalian tersebut belum diterjemahkan menjadi peningkatan kinerja individual. Dalam konteks ini, pengendalian internal lebih berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan kepatuhan, pengamanan transaksi, dan keteraturan proses daripada sebagai mekanisme transmisi yang menghasilkan peningkatan kinerja. Temuan ini memiliki kesesuaian dengan (Sari, 2022) yang menemukan bahwa pengendalian internal tidak mampu memperkuat atau memperlemah hubungan SIPD terhadap kinerja organisasi.

Akuntabilitas terbukti berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan SIPD RI terhadap kinerja bendahara pengeluaran dan menjadi kontribusi penting penelitian ini. Sistem informasi yang berkualitas menghasilkan informasi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang kemudian mendorong aparatur bekerja lebih baik demi memenuhi tuntutan pertanggungjawaban tersebut. Artinya, pengaruh SIPD RI terhadap kinerja tersalurkan melalui peningkatan akuntabilitas. Temuan ini sejalan dengan (Noviyana, 2018), (Wibowo et al., 2023), dan (Sofyani, 2024).

Kompetensi digital tidak terbukti memoderasi pengaruh SIPD RI terhadap pengendalian internal, akuntabilitas, maupun kinerja. Dalam perspektif ISSM, SIPD RI yang terstandarisasi dan memiliki fitur pengendalian otomatis, seperti validasi input, pembatasan akses, dan *audit trail*, mengurangi ketergantungan pada variasi kompetensi pengguna. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut lebih *system-driven* daripada *competency-driven*. Hasil ini sejalan dengan (Kamandita & Suwandi, 2025), (Naida et al., 2023), dan (Agustiawan & Rasmini, 2016).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi SIPD RI di Pemerintah Kabupaten Magetan berpengaruh signifikan terhadap pengendalian internal dan akuntabilitas, tetapi tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kinerja bendahara pengeluaran. Akuntabilitas terbukti menjadi mediator penuh dalam hubungan SIPD RI dan kinerja, sementara pengendalian internal tidak terbukti sebagai mediator, dan kompetensi digital tidak terbukti memoderasi hubungan-hubungan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Magetan disarankan memprioritaskan penguatan budaya akuntabilitas melalui pelatihan berbasis integritas, peningkatan transparansi pelaporan, dan penghargaan bagi aparatur yang menunjukkan kinerja akuntabel. Optimalisasi implementasi SIPD RI juga perlu menitikberatkan pada stabilitas sistem dan kecepatan respons layanan dukungan teknis. Penelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi variabel mediasi atau moderasi tambahan seperti motivasi kerja, dukungan organisasi, atau budaya organisasi, serta memperluas cakupan sampel ke beberapa pemerintah daerah untuk meningkatkan generalisabilitas temuan, mengingat keterbatasan penelitian ini pada satu kabupaten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, N. Y., & Kusuma, P. D. I. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(1), 1022–1035.
- Agostino, D., Bracci, E., & Steccolini, I. (2022). Accounting and accountability for the digital transformation of public services. *Financial Accountability & Management*, 38(2), 145–151.
- Agustiawan, N. T., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh sistem berbasis akrual, TI, dan SPIP pada kualitas laporan keuangan dengan kompetensi SDM sebagai moderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(5), 3475–3500.
- Alsharari, N. M., & Ikem, F. (2023). Digital accounting systems and information technology in the public sector: mutual interaction. *Journal of Systems and Information Technology*, 25(1), 53–73.
- Azwir, A., Yadewani, D., & Kulal, S. M. (2025). Analysis of Digital Competencies and Performance Enhancement in Public Sector Organizations. *Advancement in Management and Technology (AMT)*, 6(2), 1–7.
- Becker, G. S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. In *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. NY: Columbia University Press.
- Carretero, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). The Digital Competence Framework for Citizens: DigComp 2.1. European Commission. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
- COSO. (2013). Internal control—Integrated framework: Executive summary. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. *Management Science*, 35(8), 982–1003.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information systems success: The quest for the dependent variable. *Information Systems Research*, 3(1), 60–95.
- Dewi, M., Sumiati, N., & Suryaman, W. (2023). Pengaruh Implementasi SIPD

- Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(2), 621–624.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 4(1), 35–46.
- Hayat, U. S., & Yulianty, D. (2023). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Fraud. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 3(02), 558–566.
- Jatmiko, B., Haya, B. S., & Utami, T. P. (2022). Enhancing value for money performance in local government organizations: The role of public financial accountability and internal control. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 245–259.
- Kamandita, A. Z., & Suwandi, S. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 80–106.
- Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1290–1318.
- Maelani, P., & Susilawati, D. (2025). Kinerja organisasi: sistem informasi akuntansi pemerintahan daerah (SIPD), komitmen organisasi dan pengendalian internal. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 12(1), 2551–2563.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
- Mamić Sačer, I., & Oluić, A. (2013). Information technology and accounting information systems' quality in Croatian middle and large companies. *Journal of Information and Organizational Sciences*, 37(2), 117–126.
- Mangkunegara, A. A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Mattoasi, M., & Jainuddin, S. (2024). Pengaruh Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Tidore Kepulauan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis (JIKABI)*, 3(2), 101–112.
- Melasari, R., Roslana, R., & Silvionita, P. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Pada Opd Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 106–118.
- Moehersono, E., & Si, D. M. (2012). *Pengukuran kinerja berbasis kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Naida, N., Amir, A. M., Din, M., & Karim, F. (2023). The Effect of Implementing Local Government Information System on the Quality of Local Government Financial Reports Moderated by Human Resource Competence. *Journal of*

- World Science, 2(8), 1123–1129.
- Nisa, A. R., Zuhroh, D., & Cahyaningsih, D. S. (2026). Effects of regional information and internal control systems on financial report quality and fraud prevention. *Journal of Contemporary Accounting*, 1–12.
- Noviyana, R. A. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten). FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.
- Puspita, D. H. R., & Amalia, D. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit*, 3(2), 150–171.
- Rahmadani, P., & Khairul, K. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Aparatur Badan Keuangan Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(5), 964–971.
- Ratnajati, D., & Zulfikar, Z. (2023). The Role of Accountability In Determining The Relationship Between Quality Of Financial Reporting And Performance Of Public Organizations (Case Study on SKPD Boyolali). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBA)*, 7(2).
- Sari, D. N. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Bappeda Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4(4), 242–248.
- Satrio, S., Usman, H., & Dasila, R. A. (2026). Analysis of SIPD-RI Implementation on Financial Report Quality with Accountability as an Intervening Variable. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 21(1), 117–128.
- Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 7(4), 193–208.
- Situmorang, K. T. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. *IPDN*.
- Sofyani, H. (2024). Development of accounting information system quality in local government: mediating role of accounting competency. *International Journal of Human Capital in Urban Management*, 9(2).
- Tumija, T., & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi*, 155–169.
- Wibowo, T. S., Taryana, T., Suprihartini, Y., Tulasi, D., Supriyanto, D., & Harahap,

- A. (2023). The Effect of Accountability, Internal Control System, and Accounting Information System on The Performance of the Organization in the Financial and Asset Management Agency. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting*, 1(2).
- Winidyaningrum, C. (2009). Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda subosukawonosraten). UNS (Sebelas Maret University).

emBeji - Unidha